

JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN

[HOME](#)
[TEAM](#)

[ABOUT](#)
[REVIEWERS](#)

[USER HOME](#)

[ARCHIVES](#)


[EDITORIAL](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #2633 > [Summary](#)

#2633 SUMMARY

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

SUBMISSION

Authors	Yulianto Syahyu
Title	DILEMATIS PRAKTIK DUMPING DAN HUKUM ANTIDUMPING : Antara Kepentingan Pengusaha (Produsen) dan Masyarakat (Konsumen)
Original file	2633-6510-1-SM.DOCX 2020-11-13
Supp. files	None ADD A SUPPLEMENTARY FILE
Submitter	Yulianto Syahyu 
Date submitted	November 13, 2020 - 06:04 PM
Section	
Editor	None assigned
Author comments	Sebagai kontribusi Kami kepada Jurnal H&P dengan senang hati jika ada koreksi dan kritik dari editor untuk kesempurnaan tulisan ini.


STATUS

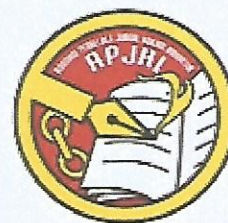
Status	Awaiting assignment
Initiated	2020-11-13
Last modified	2020-11-13

SUBMISSION METADATA

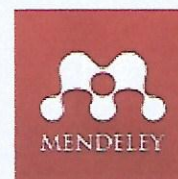
[EDIT METADATA](#)

AUTHORS

Name	Yulianto Syahyu 
Affiliation	—
Country	Indonesia



Reference
Management Tools:



ISSN:
0125-9687 (Print)
2503-1465 (Online)

Visitor:

00516545

Visitor Statistics

Bio —
 Statement
 Principal contact for editorial correspondence.

TITLE AND ABSTRACT

Title DILEMATIS PRAKTIK DUMPING DAN HUKUM ANTIDUMPING :
 Antara Kepentingan Pengusaha (Produsen) dan Masyarakat
 (Konsumen)

Abstract

Ketentuan Antidumping telah tercantum sejak disepakatinya GATT pada tahun 1947, dan ketentuan mengenai lembaga antidumping diatur dalam Pasal VI GATT. Ketentuan tersebut juga merekomendasikan setiap negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing. Sebagai bentuk implementasi ketentuan tersebut dalam sistem hukum nasional, Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Antidumping. Namun demikian, terjadi dilematis dalam hal praktik dumping dan pelaksanaan hukum antidumping di Indonesia, itu karena dalam hal ini harus dilihat dari dua sisi kepentingan, yaitu tidak hanya dari sisi kepentingan Pengusaha selaku produsen dalam negeri tetapi juga kepentingan masyarakat selaku konsumen. Karena keduanya merupakan elemen bangsa yang perlu mendapat perlakuan sama dan seimbang oleh negara.

INDEXING

Keywords Hukum, Anti Dumping, Perdagangan Internasional.
 Language id

SUPPORTING AGENCIES

Agencies —

REFERENCES

References Ade Maman Suherman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 138-139.
 Gabrielle Marceau, Antidumping and Antitrust Issues in Free Trade Areas. Oxford: Claredon Press.
 Kadarukmi, M.E. Retno, Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap Ekspor Impor Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2013
 Kompas, Selasa, 11 Juni 2002, "Tarif Impor Produk Pangan dan Pertanian Segera Naik".
 Michael J. Trebilcock & Robert Howse tentang Subsidies, Countervailing Duties, and Government Procurement, the Regulation of International Trade, USA; Routledge, 1999 (dalam Hikmahanto Juwana, Hukum Perdagangan Internasional), Pasca Sarjana FH-UI
 Prof. Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001
 Setiadi, A., Antidumping--: Dalam Perspektif Hukum Indonesia, S&R Legal Co., 2001--
 Verwey. W.D. Public International Economic Law and Development Cooperation, LL.M. Reader at Faculty of Law University of Groningen, The Netherlands.
 Victor Purba, Kontrak Jual Beli Barang Internasional, (Konvensi

[Submission Guideline](#)

[Petunjuk Penulisan](#)

[Journal Policy](#)

[Kebijakan Jurnal](#)

[Publication Ethics](#)

[Etika Penerbitan](#)

[Focus & Scope](#)

[Fokus dan Lingkup](#)

USER

You are logged in
 as...

syahyu

[My Profile](#)

[Log Out](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

[By Issue](#)

[By Author](#)

[By Title](#)

LANGUAGE

Select Language

English

Vienna 1980), Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2002.

Yulianto Syahyu, Hukum Antidumping di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan .

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

216/MPP/Kep/7/2001 Perubahan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996

Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:

427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping

Indonesia.